Jurnal JISIPOL
Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung
Volume 5, Nomor 3, November 2021 (23-36)
(P-ISSN 2087-4742)

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2013 - 2019

Djodi Setiawan [1] & Mia Isporima [2]

[1]*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Bale Bandung, Jawa Barat, Indonesia*

[2]*Program Studi Akuntansi, STIE Dharma Negara Bandung, Jawa Barat, Indonesia*

Received: 1 September 2021; Revised: 10 November 2021; Accepted: 13 November 2021; Published: 15 November 2021; Available online: November 2021.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen yang kemudian dilakukan uji hipotesis t serta uji hipotesis f. Adapun populasi penelitian ini yaitu Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013 – 2019. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor secara parsial terdapat pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di buktikan dengan hasil uji t hitung lebih besar dari t tabel (5,077>2,312) dengan signifikansi (0,007<0,050) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara parsial terdapat pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di buktikan dengan hasil uji t hitung lebih kecil dari t tabel (0,699<2,312) dengan signifikansi (0,540>0,050). Hasil uji F menunjukkan bahwa hasil F hitung lebih besar dari F tabel (39,536>6,94) dengan signifikansi (0,002<0,050) berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2013 - 2019.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pendapatan asli Daerah

PENDAHULUAN

Untuk melaksanakan otonomi daerah, khususnya pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang sah yang dikelola daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha–usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Suhendi, 2007).

Menurut Abdul Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dilansir dari berita online sukabumiupdate.com, Sukabumi. Rabu (09/10/2020). Di Provinsi Jawa Barat sendiri Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah. Hampir belanja daerah Provinsi Jawa Barat dibiayai oleh pendapatan daerah yang 70% disokong oleh Pendapatan asli Daerah. Namun, beberapa tahun ini realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat tidak memenuhi target yang di tetapkan. Meskipun angka realisasi cukup tinggi yaitu sekitar 90 persen. Tetapi, angka ini jauh dari harapan, masalah ini hadir akibat kurangnya optimalisasi sumber – sumber pendapatan yang ada.

Berdasarkan pangsanya, realisasi Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat masih didominasi oleh pajak daerah dengan rata – rata kontribusi sekitar 90 persen. Pada pos pajak daerah, penerimaan terbesar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan rata rata kontribusi 30 persen, diikuti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 25 persen. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik Jawa Barat yang padat penduduk dan salah satu pusat perekonomian Indonesia sehingga kebutuhan terhadap kendaraan bermotor sangat tinggi. Berdasarkan informasi dari Gaikindo, pangsa penjualan kendaraan bermotor di Jawa Barat adalah pangsa yang

terbesar dibandingkan provinsi lainnya yakni mencapai 22 persen. Adapun keadaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat pada periode 2013 - 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun	Realisasi		
	Pajak Kendaraan Bermotor	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pendapatan Asli Daerah
2013	3.622.079.065.860	4.061.682.681.160	9.998.972.938.028
2014	4.313.897.141.110	4.516.943.831.770	12.360.109.870.372
2015	4.938.844.130.900	5.801.025.311.100	14.338.153.309.919
2016	5.355.778.195.650	4.662.471.061.900	15.832.856.414.345
2017	6.534.044.895.492	5.192.551.608.700	17.042.895.113.672
2018	6.185.202.921.550	5.567.873.491.550	18.081.123.739.824
2019	7.513.415.158.766	5.984.049.418.600	19.642.915.447.754

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel diatas, bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun berbeda dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang cenderung mengalami fluktuatif, pada tahun 2016 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan sebesar 19 % dari tahun sebelumnya (2015) yaitu sebesar Rp. 1.138.554.249.200. Namun, kondisi ini berangsur membaik dan kembali mengalami peningkatan dari tahun 2017 – 2019. Sedangkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hanya selalu mengalami kenaikan tiap tahun. Ini membuktikan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu sumber penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial dan berpengaruh.

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelajaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, termasuk diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yangmerupakan jenis pajak daerah dan sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan semakin tinggi pencapaian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah ?
2. Bagaimana pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah ?
3. Bagaimana pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah ?

Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada matrik konsep variabel sebagai berikut:

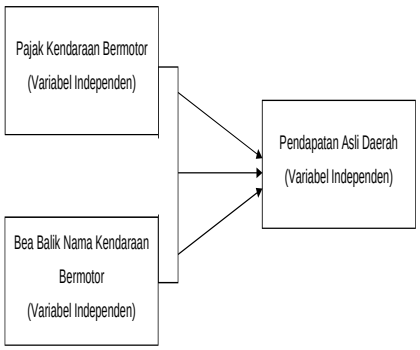

Hipotesis

1. Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada BadanPendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerahpada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tinjauan Pustaka

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pengertian "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut Mardiasmo (2013:12) menyebutkan bahwa pengertian "Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa pengertian oleh para ahli, maka dapat menyimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang tanpa imbalan langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, dan Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat- alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi. Badan. Pemerintah. Pemerintah Daerah, TNI dan Polri yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor dan atau kendaraan khusus atau alat-alat berat dan besar.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 5 Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2011, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar

menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Untuk Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Orang pribadi dan badan, yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Sedangkan wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi dan badan, yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) I adalah bea balik nama untuk kendaraan baru
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II adalah bea balik nama kendaraan bekas

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut Abdul Halim dan kusufi (2012:101) Adalah "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah". Menurut Marihot P. Siahaan (2010:14) bahwa Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan Perundang-undangan yang meliputi: Hasil pajak daerah, Hasil retribusidaerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yangdipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 18 bahwa "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan"

Berdasarkan beberapa pengertian oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa PAD penerimaan daerah yang bersumber dari daerahnya sendiri yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai dana pembangunan daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Objek Dan Metode Penelitian

Objek Penelitian

Objek penelitian ini Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun variabel bebas (variabel independen) dalam penelitian ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sedangkan variabel terikat (variabel dependen) adalah Pendapatan Asli Daerah.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus

dengan menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini berupa data laporan keuangan atau menekankan pada data-data numeric (angka).

Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel merupakan penentuan batasan yang akan lebih menjelaskan suatu variabel yang sudah didefinisikan konsepnya, yang digunakan untuk kuantifikasi gejala atau variabel yang akan diteliti. Adapun operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator Variabel	Skala
X_1 Pajak Kendaraan Bermotor (Variabel Bebas)	Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 BAB I Pasal 1 Ayat (12))	- Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor - Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor - Sanksi pajak - Kualias Pelayanan Kantor Samsat	Rasio
X_2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Variabel Bebas)	Bea Balik NamaKendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. (Undang-undang nomor 28 tahun 2009 BAB I Pasal 1 Ayat (14)).	- Pengetahuan wajib pajak - Kesadaran hukum pajak - Pengawasan terhadap petugas pemungutan pajak - Penerapan sanksi hukum	Rasio

Populasi Dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017:80) menyebutkan bahwa "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan".

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu data laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *"purposive sampling"* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan tahun 2013 sampai dengan 2019.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research)*

Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah dan meneliti jurnal-jurnal, artikel, buku dan literatur lainnya yang berhubungan erat dengan Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, seperti data yang diperoleh lewat oranglain, lewat dokumen, atau melalui media lainnya. Data yang digunakan yaitu Laporan keuangan tahunan yang dipublikasi, yaitu Realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Analisis Koefisien Korelasi

a.* Koefisien Korelasi *Product Moment

Berikut adalah hasil perhitungan koefisien korelasi *Product Moment* dengan menggunakan *software SPSS Versi 25*:

Tabel 3
Hasil Uji Korelasi Pearson Correlations

		PKB	BBNKB	PAD
PKB	Pearson Correlation	1	.776*	.973**
	Sig. (2-tailed)		.040	.000
	N	7	7	7
BBNKB	Pearson Correlation	.776*	1	.801*
	Sig. (2-tailed)	.040		.030
	N	7	7	7
PAD	Pearson Correlation	.973**	.801*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.030	
	N	7	7	7

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

***b.* Koefisien Korelasi Ganda**

Berikut adalah hasil perhitungan koefisien korelasi Ganda dengan menggunakan *software SPSS Versi 25*:

Tabel 4
Hasil Uji Korelasi Secara Simultan (R)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.976[a]	.952	.928	901.95278

Adapun tabel korelasi sebagai pedoman dalam menentukan kuat tidaknya korelasi antar variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Pedoman Interprestasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0.60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (2017:278)

Dilihat dari dua tabel perhitungan korelasi diatas, menunjukkan bahwa:

1. Korelasi antara Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,973 yang berarti terdapat korelasi positif yang menunjukan hubungan kedua variabel tersebut adalah searah, artinya jika Pajak Kendaraan Bermotor naik maka Pendapatan Asli Daerah pun akan mengalami kenaikan. Jika melihat pada interval koefisien angka 0,973 berada diantara 0,80-1,000 yang berarti variabel X1 mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan variabel Y.

2. Korelasi antara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,801 yang berarti terdapat korelasi positif yang menunjukan hubungan kedua variabel tersebut adalah searah, artinya jika Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor naik maka Pendapatan Asli Daerah pun akan mengalami kenaikan. Jika melihat pada interval koefisien angka 0,801 berada diantara 0,80-1,000 yang berarti variabel X2 mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan variabel Y.

3. Korelasi ganda antara Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan adalah searah, artinya jika Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor naik, maka Pendapatan Asli Daerah pun akan meningkat. Jika melihat pada interval koefisien, angka 0,976 berada di antara 0,80 - 1,000 yang berarti variabel X1 dan X2 memiliki hubungan yang sangat kuat dengan variabel Y.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	459.046	2765.411		.166	.876
	PKB	2.202	.434	.883	5.077	.007
	BBNKB	.542	.811	.116	.669	.540

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diatas, jadi didapat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 459{,}046 + 2{,}202X_1 + 0{,}542X_2$$

Keterangan :

a. Konstanta sebesar 459,046, Hal ini menunujukkan bahwa jika variabel independen ditiadakan atau Pajak Kendaraan Bermotor (X1) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) nilainya 0, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah 459,046.
b. Koefisien regresi Pajak Kendaraan Bermotor (X1) sebesar 2,202. Hal ini menunjukan indikasi adanya hubungan yang searah yang

artinya jika nilai variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X1) naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,202 denganasumsi variabel lain tetap.

c. Koefisien regresi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) sebesar 0,542. Hal ini menunjukan adanya indikasi adanya hubungan yang searah yang artinya jika nilai variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) naik 1% (0,01), maka akan menyebabkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,542 dengan asumsi variabel lain tetap.

3. Analisis Uji Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

a. Pengaruh secara Parsial Pajak Kendaraan Bermotor (X1) terhadap Pendapatan AsliDaerah (Y)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai t-hitung untuk variabel bebas Pajak Kendaraan Bermotor (X1) adalah sebesar 5,077 dengan signifikansi 0,007. sedangkan t^{tabel} dengan dk 4 (n-3 = 7-3) adalah 2,312 dan taraf signifikansi 0,05. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan dan hasil perhitungan diatas terlihat jika t^{hitung} lebih besar daripada t^{tabel} (3,656 > 2,312) dan taraf signifikansi X1 (0,007<0,05), maka Ho ditolak Ha diterima. Dengan demikian dapat diputuskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat periode 2013 - 2019.

b. Pengaruh secara Parsial Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai t-hitung untuk variabel bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) adalah sebesar 0,699 dengan signifikansi 0,540 sedangkan ttabel dengan dk 4 (n-3 = 7-3) adalah 2,312 dan taraf signifikansi 0,05. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan dan hasil perhitungan diatas terlihat jika thitung lebih kecil dari pada ttabel (0,699 < 2,312) dan taraf signifikansi X2 (0,540 > 0,05), maka Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian dapat diputuskan jika Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah periode 2013 - 2019, namun pengaruhnya tidak signifikan.

c. Pengaruh secara simultan Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Untuk mengetahui Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah, dihitung koefisien Determinasi.

Adapun koefisien Determinasi sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Korelasi Determinasi (R Square)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.976[a]	.952	.928	901.95278

a. Predictors: (Constant), BBNKB, PKB

Sumber: Pengolahan Data dengan *SPSS Versi 25*

Dari tabel diatas, diketahui nilai R Square sebesar 0,952. Nilai R Square menunjukkan nilai koefisien determinasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai KD = 0,952 (95,2%). Yang berarti, Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sebesar 95,2%.Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh tersebut, berikut adalah pengujian dengan menggunakan *software* SPSS versi 25:

Tabel 8
Hasil uji F Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.976[a]	.952	.928	901.95278

a. Predictors: (Constant), BBNKB, PKB

Sumber: Pengolahan Data dengan *SPSS Versi 25*

Dari tabel diatas, diketahui nilai R Square sebesar 0,952. Nilai R Square menunjukkan nilai koefisien determinasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai KD = 0,952 (95,2%). Yang berarti, Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sebesar 95,2%.Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh tersebut, berikut adalah pengujian dengan menggunakan *software* SPSS versi 25:

Tabel 8
Hasil uji F Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	64326629.354	2	32163314.677	39.536	.002[b]
	Residual	3254075.280	4	813518.820		
	Total	67580704.634	6			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), BBNKB, PKB

Sumber: Pengolahan Data dengan *SPSS 25*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai Fhitung adalah 39,536, sedangkan Ftabel dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu residual 4 dan regresi 2 dengan taraf signifikan 0,002, sehingga diperoleh Ftabel sebesar 6,94. Karena F-hitung > F-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya kedua variabel bebas yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (X1) Dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Dari tabel ANOVAb diatas dapat dilihat nilai signifikansi uji-F sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 maka keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil uji pengaruh parsial penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa variabel Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat periode 2013 - 2019. Hal ini dibuktikan dari hasil t-hitung lebih besar dari t-tabel, kemudian nilai signifikansi uji-t sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,050. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya di Provinsi Jawa Barat dan juga tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang cukup tinggi
2. Dari hasil uji pengaruh parsial penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat periode 2013 - 2019. Hal ini dibuktikan dari hasil t-hitung lebih kecil dari t-tabel, kemudian nilai signifikansi uji-t sebesar 0,540 lebih besar dari 0,050. Hal tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyrakat untuk melaporkan kendaraan bermotor mereka atau membalik namakan kendaraan bermotor.
3. Secara simultan, variabel bebas yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah yang merupakan variabel terikat, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dimana hasil analisis uji simultan menunjukkan hasil perbandingan antara F-hitung dengan F-tabel yang menunjukkan bahwa nilai (Fhitung > Ftabel), kemudian dari tabel ANOVAa dapat dilihat nilai signifikansi uji f sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,050.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat direkomendasikan saran sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan demikian Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu memaksimalkan pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dengan lebih meningkatkan sosiali membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotoral memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Dengan demikian Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus melakukan penindakan yang tegas untuk wajib pajak yang belum mendaftarkan ataupun membalik namakan kendaraan bermotor mereka dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak tepat waktu, agar penerimaan dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat diperoleh secara maksimal.
3. Secara simultan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sudah baik sehingga harus dipertahankan tetapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk dapat terus meningkatkan pelayanannya dan terus menggali potensi dan pengawasan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk melalukan optimalisasi dengan melakukan pendataan mengenai subjek dan objek Pajak Kendaraan Bermotor maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat untuk masa yang akan datang.
4. Mengingat adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan perluasan penelitian dikarenakan pentingnya informasi yang terkandung dalam laporan keuangan instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Abuyamin, Oyok. 2010. Perpajakan Pusat dan Daerah. Bandung.

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi ketujuh. Semarang: Universitas diponerogo.

Halim, Abdul & Kusufi, Halim. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah, (Jakarta: Salemba Empat).

Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: ANDI.

Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian, Cetakan 6. Bogor: Ghalia Indonesia

Nuryaman dan Christina. 2015. Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis Teori dan Praktek. Bogor: Ghalia Indonesia.

Perda Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2016. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 1 Tahun 2011. Tentang dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, pasal 25

Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2016 Provinsi Jawa Barat.Perda Provinsi Jawa Barat No. 14 Tahun 2011. tentang objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pura, Rahman. 2013. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Erlangga. Purwono, Herry. 2013. Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga.

Soemitro, Rochmat dalam Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: ANDI. Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Adimata.

Sekaran, Uma dan Bougie dalam Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian. Jakarta:Salemba Empat.

Siahaan, Marihot Pahala. 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta).